

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Proyek Pengolahan RDF di Bantargebang Segera Selesai

Soft launching proyek RDF oleh Anies dinilai mengejar peresmian sebelum purna tugas.

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

BEKASI — Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan segera mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar ramah lingkungan lewat proyek *refuse-derived fuel* (RDF) plant. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pembangunan pengelolaan sampah dengan teknologi RDF plant di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, diproyeksikan selesai akhir tahun ini dan beroperasi pada 2023.

"Saat ini, (pembangunan RDF plant) telah 83 persen. Ini adalah fasilitas pengolahan RDF terbesar di Indonesia," kata Anies saat pembukaan awal atau *soft launching* RDF Plant di lokasi, Senin (10/10).

Dengan adanya pengelolaan sampah itu, Anies menyebut, sampah baru dan lama dari Bantargebang akan diolah menjadi bahan bakar energi terbarukan pengganti batubara. Pengolahan itu, selain memiliki nilai ekonomis, kata dia, juga ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan oleh pabrik semen.

"Jadi, secara bertahap nanti akan mengolah tumpukan-tumpukan sampah di Bantargebang untuk diubah menjadi RDF," kata Anies.

Sebagai tahap awal, TPST Bantargebang ditargetkan mengolah masing-masing 1.000 ton sampah baru dan 1.000 ton tumpukan sampah lama menjadi sekitar 700-750 ton RDF per hari. Dengan pengolahan sampah itu, tumpukan sampah di TPST Bantargebang dapat dikurangi secara bertahap mengingat jumlah sampah dari



Secara bertahap nanti akan mengolah tumpukan-tumpukan sampah di Bantargebang untuk diubah menjadi RDF.

Jakarta yang dikirim ke TPST itu mencapai sekitar 7.500 ton per hari yang diangkut sekitar 1.200 truk.

Hasil pengolahan sampah berupa RDF tersebut akan diserap dua pabrik semen, yakni PT Indocement Tungal Prakarsa dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Kedua perusahaan itu telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI di sela pembukaan awal tersebut, yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerja sama jual beli RDF.

Pembukaan dipaksakan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, fasilitas *landfill mining* dan RDF plant dilengkapi sarana pengendalian pencemaran lingkungan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pemantauan kualitas lingkungan, yakni stasiun pemantauan kualitas udara. Dia berharap proyek tersebut bisa selesai seluruhnya pada akhir November 2022 dan sesuai dengan target jadwal, pembiayaan, dan kualitas.

"Kami juga telah menyiapkan kelembagaan untuk pengelolaan fasilitas ini dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu (BLUD UPST)" kata Asep.

Untuk pembiayaan, kata dia, proyek RDF menggunakan dana gabungan dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan APBD DKI Jakarta. Dari APBD 2022, penganggaran untuk fasilitas itu mencapai Rp 613 miliar, sedangkan dari PEN sekitar Rp 456 miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ida Mahmudah menilai kunjungan Anies dalam pembukaan awal RDF plant di TPST Bantargebang hanya mengejar jadwal peresmian sebelum masa jabatan selesai pada 16 Oktober 2022. Dia menyebut, *soft launching* terkesan dipaksakan.

"Kemarin kami juga baru kunjungan ke sana, tapi mesin besar-besar belum dirakit dan ada yang belum sampai. Atap juga belum selesai," kata Ida.

Dia mengatakan, pembangunan RDF plant di TPST Bantargebang ditargetkan selesai akhir tahun setelah lelang tender yang telat beberapa waktu lalu. Namun, pihaknya percaya proyek tersebut akan selesai sesuai jadwal yang ditentukan.

"Tapi, dengan Pak Heru (penjabat gubernur DKI) saya yakin dia lebih bisa mendengarkan (DPRD). Pak Heru bisa menjalankan tugas layaknya pengawasan dan fungsi," ujarnya. ■ edi nur aini